

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan



*Untuk segera diterbitkan*

### **BPK Jateng Serahkan 16 LHP atas LKPD Tahun 2023**

**Semarang, Rabu(22/04/24)** - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menyerahkan enam belas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023. LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Hari Wiwoho kepada kepala daerah dan pimpinan DPRD masing-masing entitas.

Keenam belas pemerintah daerah yang menerima LHP atas LKPD Tahun 2023 adalah:

1. Pemerintah Kota Surakarta
2. Pemerintah Kabupaten Kebumen
3. Pemerintah Kabupaten Klaten
4. Pemerintah Kabupaten Grobogan
5. Pemerintah Kabupaten Rembang
6. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
7. Pemerintah Kabupaten Semarang
8. Pemerintah Kabupaten Pemalang
9. Pemerintah Kota Pekalongan
10. Pemerintah Kabupaten Batang
11. Pemerintah Kabupaten Magelang
12. Pemerintah Kabupaten Pati
13. Pemerintah Kabupaten Brebes
14. Pemerintah Kabupaten Cilacap
15. Pemerintah Kabupaten Kudus
16. Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Atas LKPD keenam belas pemerintah daerah tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selain kepala daerah dan pimpinan DPRD, acara penyerahan juga dihadiri oleh para Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Kepala BPKAD masing-masing daerah. Turut hadir pula para Kepala Subauditorat dan tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Jateng.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan permasalahan antara lain terdapat pengelolaan pendapatan pajak daerah belum memadai sehingga terjadi kekurangan penerimaan, terdapat kekurangan volume pekerjaan sehingga terjadi kelebihan pembayaran, terdapat kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) tidak sesuai ketentuan, terdapat pembayaran jasa konsultasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya sehingga terjadi kelebihan pembayaran, dan implementasi SIPD belum dilaksanakan secara optimal.

Dalam sambutannya, Kalan BPK Jateng Hari Wiwoho mengingatkan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sehingga integrasi Laporan secara nasional bisa terwujud nantinya.

Menutup sambutannya, Hari Wiwoho berharap opini WTP dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

(\*)

---

#### **Informasi lebih lanjut:**

Siti Rahmawati Arifah, Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat  
Telp. 024-8660826 Ext. 2013  
Email: [humas.jateng@bpk.go.id](mailto:humas.jateng@bpk.go.id)